

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ditengah tantangan program masyarakat ekonomi ASEAN dan bergabungnya Indonesia ke forum G20 maka Indonesia melakukan konvergensi terhadap *International Financial Reporting Standards (IFRS)* yang dilakukan secara bertahap, begitu juga untuk SAK ETAP. SAK ETAP nampak sejalan dengan *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)*. Dimana *IFRS for SMEs* digunakan juga untuk entitas tanpa akuntabilitas publik contoh UMKM, BUMD dan entitas lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menyusun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang berlaku efektif per 1 Januari 2011.

Pilar standar di Indonesia terdiri dari lima standar salah satunya adalah SAK ETAP. SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan pengguna SAK ETAP. Pengguna SAK ETAP adalah entitas tanpa akuntabilitas publik contohnya adalah perusahaan daerah (PDAM), UMKM, CV, PT (non emiten) dan unit jasa lainnya

yang tidak melakukan daftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu bentuk keberhasilan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah laporan keuangan yang berkualitas dan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

Implementasi SAK ETAP dapat mempermudah PDAM dalam menyusun laporan keuangan, dimana pengaturan dan perhitungan akan lebih sederhana karena memang ditujukan untuk usaha menengah kebawah. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh kemudahan. SAK ETAP merupakan PSAK yang disederhanakan dengan memberikan pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana, memberikan penyederhanaan pengakuan dan pengukuran, serta mengurangi pengungkapan.

PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Tujuan utama dalam PDAM ini bukan hanya sekedar untuk mencari laba tetapi fungsi sosial dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Berkembangnya PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan yang sedemikian rupa, sekiranya sudah cukup disadari bahwa PDAM merupakan suatu usaha air minum yang perlu dikelola secara profesional karena menyerap banyak tenaga kerja, dana, dan prasarana.

Pemerintah telah mengeluarkan Petunjuk Teknis (juknis) SAK ETAP pada tahun 2009. SAK ETAP ini akan mempermudah PDAM dalam penyusunan laporan keuangan, karena dalam SAK ETAP ini peraturan dan perhitungan lebih sederhana. Dengan menggunakan sistem ini, maka diharapkan PDAM dapat lebih fokus pada

pengembangan sistem air minum dan investasi untuk perluasan layanan tanpa terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan. PDAM memiliki kriteria sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga dapat menggunakan SAK ETAP dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangannya.

Badan Pendukung Pengembangan Penyedia Air Minum (BPSSPAM), Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, BPKP, Perpamsi dan IAI serta PDAM membuat Petunjuk Teknis (juknis) penerapan SAK ETAP untuk PDAM. Petunjuk Teknis (juknis) penerapan SAK ETAP untuk PDAM mulai berlaku pada Januari 2012. Pada tahun 2012 PDAM harus menggunakan SAK ETAP, jika PDAM tidak menggunakan SAK ETAP akan memperoleh opini *disclamer* (Andalusia, 2012). Petunjuk Teknis (juknis) tahun 2012 mengalami perubahan dan perkembangan sehingga menjadi buku pedoman penyusunan laporan keuangan PDAM (dasar – dasar akuntansi dan siklus akuntansi) pada tahun 2015.

Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (PDAM) yang terdapat pada pasal 98 ayat 2 yang berbunyi laporan keuangan paling sedikit memuat:

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya.
- b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan.
- c. Laporan arus kas dan setara kas.
- d. Laporan perubahan ekuitas.
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Dalam menilai keberhasilan perusahaan diperlukan laporan keuangan perusahaan. Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan keuangan kedalam komponen laporan keuangan dan penelaahan masing-masing komponen laporan keuangan serta hubungan antar komponen, dengan menggunakan teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang laporan keuangan tersebut, agar analisis laporan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Analisis terhadap laporan keuangan digunakan metode dan teknik analisis untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan masing-masing pos bila diperbandingkan. Hasil dari perbandingan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas yang dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan pada PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan, peneliti menggunakan metode analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas periode 2016-2017. Dengan laporan neraca dan laporan rugi-laba, peneliti dapat mengetahui tingkat rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dan dapat menilai

kinerja dari suatu perusahaan. Sedangkan dengan laporan arus kas dapat lebih akurat dalam memperoleh informasi mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Selain dengan misi bisnis dan sosial, PDAM juga harus memperhatikan kinerja keuangannya, sehingga dapat mengetahui kondisi kesehatan perusahaannya agar mampu memprediksi keputusan operasional pada masa yang akan datang. Hal ini perlu dilakukan oleh PDAM karena PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang merupakan penyumbang dana bagi pembangunan daerah. Perusahaan dikatakan fungsional, kalau mampu menyumbang 55% dari laba bersihnya bagi pembangunan daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan milik daerah yang segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha pengelolaan diserahkan kepada perusahaan swasta, sehingga dalam operasional perusahaan harus dapat mencapai keuntungan. Ukuran keberhasilan yang digunakan adalah dengan melihat kinerja keuangan PDAM yang berasal dari laporan keuangannya, kemudian dianalisis dalam rasio-rasio keuangan.

Penelitian yang berkaitan dengan SAK ETAP dan rasio keuangan sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah Handono dan Sunarti (2016), yang menyatakan bahwa Laporan keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah sesuai dengan SAK ETAP kecuali cadangan sosial dan pendidikan, cadangan dana pensiun dan sokongan, cadangan dana produksi serta cadangan umum. Berdasarkan SAK ETAP yang diperbolehkan hanya cadangan umum untuk kepentingan investasi, sedangkan cadangan lainnya tidak diperbolehkan karena saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan

pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan yang sesuai dengan bab 19 paragraf 19.29 (paragraf 19 baris ke 29) dalam penyajian dan pengungkapan saldo laba. Dengan kata lain PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sudah menerapkan SAK ETAP tetapi penerapannya belum sepenuhnya.

Langhengking *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa, dalam pengelolaan piutang dan pencatatan akuntansi piutang PDAM Kabupaten Minahasa Utara masih banyak ketidaksesuaian dengan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi PDAM Peraturan Menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2007 dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa tidak membuat cadangan piutang.

Paskahyati (2015) menyatakan bahwa pengakuan pendapatan PDAM Kota Kupang tidak sesuai dengan SAK ETAP karena diakui secara *cash basis* sedangkan menurut SAK ETAP harus diakui secara *accrual basis*, pengukuran pendapatan PDAM Kota Kupang sesuai dengan SAK ETAP yaitu diukur sesuai nilai wajar, perhitungan pajak penghasilan terhutang PDAM Kota Kupang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan karena pendapatan deposito tidak dikoreksi dan terdapat perbedaan beban penyusutan secara fiskal dan komersial, penyetoran pajak penghasilan terhutang PDAM Kota Kupang sesuai Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan karena disetor sebelum batas penyampaian SPT tahunan badan.

Sari (2016) mengungkapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda telah menerapkan atau telah mengadopsi SAK ETAP dalam penyusunan pelaporan keuangan perusahaannya, dalam penyusunan dan penyajian pelaporannya, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda telah sesuai dengan metode pengukuran

Historical Cost of Human Resource, akuntansi sumber daya manusia sangat perlu diterapkan pada sebuah perusahaan.

Fitriana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) pada PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penyajian kembali laporan perubahan ekuitas berbasis SAK ETAP mengakibatkan penurunan ekuitas. Laporan arus kas yang tadinya menggunakan metode langsung (*direct method*), sekarang menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*).

Sartika (2018) dalam penelitiannya yang berjudul analisis perlakuan piutang pelanggan pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo menunjukkan bahwa proses akuntansi terhadap piutang yang dilaksanakan pada perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada SAK ETAP. Perlakuan akuntansi piutang usaha pada PDAM Delta Tirta Sidoarjo menggunakan metode akrual basis. Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Handono dan Sunarti (2016) dimana dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan SAK ETAP dengan benar atau tidak.

Sri Sutanti Handayani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis rasio sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta ditinjau dari aspek keuangan dalam negeri nomor 47 tahun 1999 menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kota Surakarta adalah dalam kategori cukup. Tahun 2007 dengan kategori kurang, tahun 2008 dengan kategori cukup, tahun 2009

dengan kategori cukup, tahun 2010 dengan kategori baik, dan untuk tahun 2011 dengan kategori cukup.

Cahyo Utomo Adi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja dengan pendekatan *balance scorecard* (studi kasus PDAM Tirta Dharma Kabupaten Klaten) menunjukkan bahwa PDAM mampu berkembang, memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman serta mengoperasikan instalasi secara efisien dalam memberikan suatu pelayanan yang prima kepada pelanggan maupun kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

Agustina Mahardika Putri (2017) dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Berdasarkan Rasio Likuiditas dan Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Surakarta dilihat dari rasio likuiditas dan rasio profitabilitas masuk dalam kategori perusahaan yang baik.

Alfian Hakim Nurcahaya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja PDAM Kota Pekalongan menunjukkan bahwa Kinerja PDAM Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, yang termasuk dalam kategori kinerja sangat baik.

Defani Putri Frinka (2016) dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja perusahaan dengan pendekatan *balanced scorecard* pada PDAM Kota Malang (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang periode 2012-2014) menunjukkan bahwa hasil penilaian kinerja untuk perspektif keuangan yang

menunjukkan bahwa kinerja keuangan PDAM Kota Malang tahun 2012-2014 masih dalam kondisi fluktuasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang SAK ETAP yang diterapkan PDAM di beberapa daerah masih ditemukan laporan keuangan PDAM belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dan ada yang belum menerapkan SAK ETAP. Serta mengetahui penyajian Laporan Keuangan di PDAM terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan SAK ETAP?
2. Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan pada kinerja keuangan selama tahun 2016-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dengan SAK ETAP.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dalam menilai kinerja keuangan selama tahun 2016-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan :

- a. Memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian mengenai SAK-ETAP dan kinerja keuangan.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah literatur dalam melakukan kajian mengenai penerapan SAK-ETAP dapat diberlakukan di Badan Usaha Milik Daerah terutama di PDAM.
- c. Sebagai dasar dalam memantapkan pertanggungjawaban lembaga BUMN kepada masyarakat.
- d. Dapat memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan dan dengan desain yang dinamis, membuat standar keuangan bisa digunakan hingga beberapa tahun kemudian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi manajemen, BUMN, maupun lembaga UKM dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pertimbangan dalam penerapan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.
- b. Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi PDAM khususnya dalam analisis laporan keuangan untuk melakukan penilaian kinerja.